



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI MANTORO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **190149**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **998.000.000**

1. Tanah Seluas 1140 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 89.000.000
2. Tanah Seluas 880 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 77.000.000
3. Tanah Seluas 916 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/930 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/300 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 95.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 78.000.000
8. Tanah Seluas 1140 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 75.000.000
9. Tanah Seluas 1040 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 57.000.000
10. Tanah Seluas 460 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 72.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **284.000.000**



1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIVAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOTOR, KAWASAKI KLX 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	11.350.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	13.564.608
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.306.914.608
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.306.914.608

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.